



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SITI LITAWATI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 666120

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.170.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 880 m²/200 m² di KAB / KOTA PRINGSEWU, WARISAN Rp. 880.000.000
2. Tanah Seluas 833 m² di KAB / KOTA PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. Tanah Seluas 4409 m² di KAB / KOTA PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
4. Tanah Seluas 3190 m² di KAB / KOTA PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1616 m²/24 m² di KAB / KOTA PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
6. Tanah Seluas 10000 m² di KAB / KOTA TANGGAMUS, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m²/175 m² di KAB / KOTA PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
8. Tanah Seluas 653 m² di KAB / KOTA PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
9. Tanah Seluas 625 m² di KAB / KOTA PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 289.000.000

1. MOTOR, YAMAHA VEGA ZR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000



2. MOTOR, YAMAHA VEGA ZR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
2.000.000

3. MOBIL, TOYOTA INOVA REBOND Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 285.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 312.270.721

F. HARTA LAINNYA

Rp. 115.000.000

Sub Total

Rp. 2.886.270.721

III. HUTANG

Rp. 179.900.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.706.370.721

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.